JOURNAL OF HUMAN AND EDUCATION

E-ISSN: 2776-5857 | P-ISSN: 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe
Vol. 6, No. 6 (2026)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan

Riandhikatama Bagus Suharjo[1*], Baso Amang[2], Muh. Arif[3]
Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
**Email: riandhikatama.bagus06@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 70 aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe Kepulauan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga □embangu tersebut secara □embang-sama memberikan kontribusi yang kuat dalam meningkatkan kinerja □embangunan daerah, dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai □embangu yang memberikan pengaruh terbesar. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas □emban daerah, pengelolaan keuangan yang efektif, dan akuntabilitas yang baik merupakan □emban penting dalam mendukung keberhasilan □embangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, serta memperkuat akuntabilitas dan tindak lanjut hasil pengawasan guna mewujudkan Pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Kinerja Pembangunan Daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD), Regional Financial Management, and Accountability on the Regional Development Performance of Konawe Kepulauan Regency. A quantitative approach with a survey method was employed involving 70 government officials engaged in regional financial management across Regional Apparatus Organizations (Organisasi Perangkat Daerah/OPDs) in Konawe Kepulauan Regency. Data were collected through questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS4 software.

The findings indicate that Local Own-Source Revenue (PAD), Regional Financial Management, and Accountability each have a positive and significant effect on Regional Development Performance in Konawe Kepulauan Regency. The results further reveal that these three variables collectively make a substantial contribution to improving regional development performance, with Local Own-Source Revenue (PAD) exerting the strongest influence. These findings suggest that stronger regional fiscal capacity, effective financial management, and sound accountability are essential factors in achieving successful regional development. Therefore, the local government should optimize Local Own-Source Revenue, improve the quality of regional financial management, and strengthen accountability as well as the follow-up of audit findings to achieve more effective, transparent, and sustainable regional development.
Keywords: *Local Own-Source Revenue, Regional Financial Management, Accountability, Regional Development Performance.*

PENDAHULUAN

Pemerataan pembangunan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, sejumlah daerah di kawasan tersebut masih menghadapi ketertinggalan pembangunan dibandingkan wilayah barat Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan (Haryono & Ramlah, 2024). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dan mengelola keuangan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja pembangunan. Hal tersebut tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan dari 65,57 pada tahun 2021 menjadi 69,39 pada tahun 2025, tetapi masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 74,25 (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia belum sepenuhnya mampu mengejar capaian pembangunan pada tingkat provinsi. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam kondisi tersebut adalah kemampuan fiskal pemerintah daerah, khususnya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Permasalahan kapasitas fiskal Kabupaten Konawe Kepulauan terlihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2021–2025 hanya berkisar antara 1,85% hingga 3,25%. Meskipun mengalami peningkatan dari 2,00% pada tahun 2021 menjadi 3,25% pada tahun 2025, proporsi tersebut masih menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (DJPK Kementerian Keuangan, 2026). Temuan Kawatak (2023) juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Konawe Kepulauan masih tergolong rendah, dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 6,51%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan melalui sumber pendapatan sendiri masih terbatas. Padahal, optimalisasi PAD dapat memperluas ruang fiskal pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah (Rerung et al., 2025).

Selain kemampuan meningkatkan pendapatan daerah, kinerja pembangunan juga dipengaruhi

oleh kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien diperlukan agar sumber daya keuangan daerah dapat dialokasikan sesuai prioritas pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sahrudin dan Syahid (2025) menjelaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan melalui pemanfaatan anggaran yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, besarnya pendapatan daerah perlu diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran secara tepat agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pembangunan.

Fenomena pengelolaan keuangan di Kabupaten Konawe Kepulauan memperlihatkan adanya kondisi yang menarik untuk dikaji. Pemerintah daerah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan serta penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) pada tahun 2024. Selain itu, Kabupaten Konawe Kepulauan juga masuk dalam lima kabupaten dengan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terbaik di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025 (Umbaran.id, 2026). Berbagai capaian tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kemandirian fiskal. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih berada di bawah 5%, sementara alokasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp189,10 miliar dari total APBD sebesar Rp417,29 miliar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas tata kelola keuangan yang memperoleh pengakuan positif belum tentu secara langsung mencerminkan kemampuan fiskal dan keberhasilan pembangunan daerah secara optimal.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam mendukung kinerja pembangunan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat (UNDP, 1997). Penerapan akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap peraturan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Sharon et al. (2024) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang dapat mendukung efektivitas pengelolaan keuangan dan keberhasilan pembangunan daerah. Dalam konteks Kabupaten Konawe Kepulauan, aspek transparansi masih memerlukan perhatian. Informasi pengelolaan keuangan yang dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah daerah masih didominasi dokumen Tahun Anggaran 2023, sedangkan informasi untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 belum tersedia secara lengkap hingga penelitian ini dilakukan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi keuangan daerah masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara aspek keuangan daerah dan kinerja pemerintahan. Halim dan Iqbal (2012) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Arifianti et al. (2013) menunjukkan bahwa pengendalian internal dan akuntabilitas berkontribusi terhadap peningkatan kinerja instansi. Sementara itu, Rampisela et al. (2021) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap efektivitas pembangunan. Penelitian Kawatak (2023) secara khusus menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Konawe Kepulauan dan menemukan bahwa efektivitas PAD relatif tinggi, tetapi tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung mengkaji variabel PAD, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas secara terpisah serta menggunakan indikator kinerja yang berbeda. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu model penelitian untuk menjelaskan kinerja pembangunan daerah, khususnya pada daerah otonom dengan karakteristik kepulauan dan keterbatasan kapasitas fiskal.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dan kesenjangan empiris (*empirical gap*) yang mendasari pentingnya penelitian ini. Kesenjangan empiris terlihat dari adanya kontradiksi antara capaian tata kelola keuangan Kabupaten Konawe Kepulauan yang memperoleh berbagai pengakuan positif dengan kondisi kapasitas fiskal yang masih rendah, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta capaian pembangunan manusia yang belum menyamai rata-rata provinsi. Sementara itu, kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas dalam menjelaskan kinerja pembangunan secara simultan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian ketiga variabel tersebut dalam satu kerangka empiris dengan mengambil konteks Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai daerah otonom berbasis kepulauan yang memiliki karakteristik dan tantangan fiskal tersendiri.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian administrasi publik dan keuangan daerah, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pembangunan pada daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan optimalisasi PAD, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, serta memperkuat akuntabilitas publik guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

METODE

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas-verifikatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas terhadap kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan. Pengujian dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi penelitian mencakup instansi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah, antara lain Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat Daerah, serta OPD terkait lainnya. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi instansi tersebut dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih satu bulan, meliputi persiapan instrumen, pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dalam bentuk skor jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner mengenai PAD, pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan kinerja pembangunan daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen laporan keuangan daerah, publikasi resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian.

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi penelitian adalah aparatur pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan pada 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan

jumlah keseluruhan 70 orang. Responden terdiri atas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 70 responden. Teknik ini dipilih karena seluruh anggota populasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan pembangunan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen utama penelitian. Kuesioner diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai variabel PAD, pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan kinerja pembangunan daerah. Pengukuran jawaban responden menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). Selain itu, pengumpulan data didukung dengan dokumentasi terhadap laporan keuangan, dokumen perencanaan pembangunan, peraturan, dan publikasi resmi pemerintah. Observasi dan wawancara terbatas juga digunakan sebagai teknik pendukung untuk memperoleh informasi tambahan terkait kondisi pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4. Metode ini digunakan karena mampu menganalisis hubungan antar variabel laten dengan jumlah sampel relatif kecil dan tidak mensyaratkan asumsi normalitas data secara ketat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Outer Model

a. Uji Validitas Konvergen

Tabel 1 Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Kode	Outer Loading	AVE
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)	Hasil Pajak Daerah	X1.1	0,762	0,610
		X1.2	0,759	
	Hasil Retribusi Daerah	X1.3	0,743	
		X1.4	0,746	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	X1.5	0,777	
		X1.6	0,786	
	Lain-lain PAD yang Sah	X1.7	0,778	
		X1.8	0,783	
	Seluruh Indikator	X1.9	0,812	
		X1.10	0,856	
Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	Kualitas Perencanaan Anggaran	X2.1	0,816	0,650
		X2.2	0,817	
	Kesesuaian Pelaksanaan Anggaran	X2.3	0,773	
	Efektivitas Penggunaan Anggaran	X2.4	0,794	
		X2.5	0,779	

Variabel	Indikator	Kode	Outer Loading	AVE
	Efisiensi Pengelolaan Anggaran	X2.6	0,789	
	Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian	X2.7	0,856	
		X2.8	0,752	
	Ketepatan Pelaporan Keuangan	X2.9	0,867	
		X2.10	0,809	
Akuntabilitas (X3)	Transparansi Pengelolaan Anggaran	X3.1	0,792	0,616
		X3.2	0,820	
	Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	X3.3	0,757	
		X3.4	0,735	
	Kepatuhan terhadap Peraturan	X3.5	0,841	
		X3.6	0,781	
	Keterbukaan Informasi Publik	X3.7	0,740	
		X3.8	0,763	
	Pengawasan dan Pengendalian Internal	X3.9	0,803	
		X3.10	0,807	
Kinerja Pembangunan (Y)	Pemerataan Hasil Pembangunan	Y1	0,841	0,663
		Y2	0,872	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Y3	0,789	
		Y4	0,850	
	Pembangunan Infrastruktur Daerah	Y5	0,840	
		Y6	0,775	
	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Y7	0,809	
		Y8	0,790	
	Efektivitas Program Pembangunan	Y9	0,762	
		Y10	0,806	

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen pada Tabel 1 diatas, seluruh indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70 dan nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas 0,50. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh nilai *outer loading* sebesar 0,743–0,856 dengan AVE sebesar 0,610. Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai *outer loading* sebesar 0,752–0,867 dengan AVE sebesar 0,650. Selanjutnya, variabel Akuntabilitas menunjukkan nilai *outer loading* sebesar 0,735–0,841 dengan AVE sebesar 0,616, sedangkan variabel Kinerja Pembangunan memperoleh nilai *outer loading* sebesar 0,762–0,872 dengan AVE sebesar 0,663.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator mampu merepresentasikan konstruk masing-masing secara memadai. Nilai AVE pada seluruh variabel juga telah memenuhi kriteria minimum 0,50, yang menunjukkan bahwa masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya. Dengan demikian, seluruh indikator dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen dan layak digunakan dalam analisis model struktural (*inner model*).

b. Uji Reliabilitas

Setelah seluruh indikator dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha.

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)	0,929	0,931	0,940
Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	0,940	0,946	0,949
Akuntabilitas (X3)	0,930	0,935	0,941
Kinerja Pembangunan (Y)	0,943	0,946	0,951

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 2 diatas, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability (rho_a), dan Composite Reliability (rho_c) di atas 0,70. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh nilai masing-masing sebesar 0,929; 0,931; dan 0,940. Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh nilai 0,940; 0,946; dan 0,949. Selanjutnya, variabel Akuntabilitas memiliki nilai 0,930; 0,935; dan 0,941, sedangkan variabel Kinerja Pembangunan memperoleh nilai 0,943; 0,946; dan 0,951. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Dengan demikian, seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel dan memenuhi kriteria untuk digunakan dalam analisis model struktural (*inner model*).

2. Uji Hipotesis

Tabel 3 Path coefficients

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
Pendapatan Asli Daerah (PAD) -> Kinerja Pembangunan	0,378	0,383	0,086	4,410	0,000
Pengelolaan Keuangan Daerah -> Kinerja Pembangunan	0,273	0,264	0,097	2,815	0,005
Akuntabilitas -> Kinerja Pembangunan	0,362	0,364	0,076	4,782	0,000

Berdasarkan hasil pengujian *path coefficients* pada Tabel 3 diatas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,378, t-statistic sebesar 4,410, dan p-value sebesar 0,000. Pengelolaan Keuangan Daerah juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,273, t-statistic sebesar 2,815, dan p-value sebesar 0,005. Sementara itu, Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,362, t-statistic sebesar 4,782, dan p-value sebesar 0,000. Seluruh hubungan tersebut memenuhi kriteria signifikansi, yaitu t-statistic lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan besarnya koefisien jalur, PAD memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap kinerja pembangunan, diikuti oleh Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, ketiga hipotesis penelitian dinyatakan didukung oleh hasil pengujian empiris.

3. Uji Kecocokan Model

a. R Square

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Hair et al. (2022), nilai R^2 sebesar 0,75 dikategorikan kuat, 0,50 dikategorikan sedang, dan 0,25 dikategorikan lemah.

Tabel 4. R Square

Variabel	R-square	R-square adjusted
Kinerja Pembangunan (Y)	0,693	0,679

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4 diatas, variabel Kinerja Pembangunan memperoleh nilai R-square sebesar 0,693 dan Adjusted R-square sebesar 0,679. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas secara bersama-sama mampu menjelaskan 69,3% variasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan, sedangkan 30,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Sementara itu, nilai Adjusted R-square sebesar 0,679 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah prediktor dan ukuran sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variasi Kinerja Pembangunan mencapai 67,9%. Dengan demikian, model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik dalam menggambarkan hubungan antara ketiga variabel independen dan Kinerja Pembangunan.

b. F Square

Tabel 5 F Square

Variabel	Kinerja Pembangunan (Y)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)	0,287
Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	0,157
Akuntabilitas (X3)	0,300

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5 diatas, nilai F-square menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 0,287, Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,157, dan Akuntabilitas sebesar 0,300 terhadap Kinerja Pembangunan. Berdasarkan kriteria Hair et al. (2022), ketiga variabel tersebut termasuk dalam kategori pengaruh sedang (*medium effect*), karena memiliki nilai F-square antara 0,15 dan 0,35. Akuntabilitas memiliki ukuran efek terbesar, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel memberikan kontribusi terhadap model struktural dalam menjelaskan Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan besaran kontribusi yang berbeda.

c. Model Fit

Tabel 6 Model Fit

Kriteria	Saturated model	Estimated model
SRMR	0,076	0,076
d_ULS	4,795	4,795
d_G	3,877	3,877
Chi-square	1041,009	1041,009
NFI	0,643	0,643

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6 diatas, nilai Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) pada *saturated model* dan *estimated model* masing-masing sebesar 0,076. Nilai tersebut berada di bawah kriteria 0,08, sehingga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kecocokan yang memadai dengan data empiris. Sementara itu, nilai d_ULS sebesar 4,795, d_G sebesar 3,877, Chi-square sebesar 1041,009, dan Normed Fit Index (NFI) sebesar 0,643. Nilai NFI tersebut menunjukkan bahwa kecocokan model terhadap model dasar masih terbatas. Dengan demikian, berdasarkan nilai SRMR, model penelitian dapat dinilai memiliki kecocokan yang memadai untuk digunakan dalam menganalisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,378, t-statistic sebesar 4,410, dan p-value kurang dari 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Ketersediaan sumber pendanaan yang memadai memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, serta program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Hasil ini juga memperkuat konsep desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai daerah kepulauan, optimalisasi PAD perlu diimbangi dengan pengalokasian anggaran yang mempertimbangkan karakteristik geografis dan kebutuhan pemerataan pembangunan. Keterbatasan aksesibilitas dan distribusi pelayanan publik menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa peningkatan pendapatan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan PAD tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga harus diarahkan pada pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik secara merata.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Wahyuni dan Ali (2024) yang menyimpulkan bahwa efektivitas PAD, kemandirian keuangan daerah, dan kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Hasil ini juga mendukung penelitian Sianturi dan Dwicaksono (2023) yang menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan melalui aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan perlu mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pengelolaan aset daerah, serta mengembangkan sumber PAD lainnya yang sah. Upaya tersebut perlu

disertai transparansi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar penguatan kapasitas fiskal dapat memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.

2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,273, t-statistic sebesar 2,815, dan p-value sebesar 0,005. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pengelolaan keuangan daerah, semakin besar peluang tercapainya pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Pengelolaan keuangan yang didukung perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan pelaporan yang baik dapat meningkatkan kualitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian target pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan perspektif New Public Management (NPM), yang menekankan orientasi pengelolaan sektor publik pada hasil (performance-oriented budgeting). Artinya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh efektivitas dan efisiensi pemanfaatannya. Dalam konteks Kabupaten Konawe Kepulauan, karakteristik wilayah kepulauan dan keterbatasan alokasi belanja modal menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran serta memprioritaskan belanja pada sektor publik yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Astuti, Ilham, dan Madjid (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Kromen, Manafe, dan Perseveranda (2023) menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung penerapan good governance dan peningkatan kinerja pemerintah. Dengan demikian, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,362, t-statistic sebesar 4,782, dan p-value kurang dari 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat mendorong peningkatan kinerja pembangunan. Akuntabilitas memastikan bahwa penggunaan anggaran dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan.

Temuan ini memperkuat teori Good Governance, yang menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Dalam konteks pembangunan daerah, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan administratif, tetapi juga melalui keterbukaan informasi anggaran, pengawasan pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban atas manfaat pembangunan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, penguatan transparansi informasi publik dan tindak lanjut hasil pengawasan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sianturi dan Dwicaksono (2023) yang menemukan bahwa akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah. Temuan ini juga mendukung penelitian Amelia dan Hidajat (2025) mengenai peran akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan agar pengelolaan

anggaran tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang mampu dihimpun pemerintah daerah, maka semakin baik Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel mampu meningkatkan Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, maka semakin baik Kinerja Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muslim Indonesia, khususnya Program Pascasarjana, atas dukungan akademik selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Apresiasi secara khusus diberikan kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam pengisian kuesioner sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alibas, S. (2024, Agustus 30). Data BPS 2024: Tingkat kemiskinan di Konawe Kepulauan menurun, efek kontribusi pertambangan. Laporan Bappeda Kabupaten Konawe Kepulauan, dikutip oleh Langit Sultra.

Amelia, H.L. dan Hidajat, S. (2025), "Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Instansi Publik", Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 8, No. 2, hlm. 562–573.

Arifianti, R. R., Utami, R., & Suryadi, A. (2013). Pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, 12(1), 49–50.

Astuti, H.P., Ilham, M. dan Madjid, U. (2024), "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang", Jurnal Kajian Pemerintah, Vol. 10, No. 1, hlm. 174–185.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Kepulauan. (2024). Kabupaten Konawe Kepulauan dalam angka 2024. BPS Kabupaten Konawe Kepulauan.

Badan Pusat Statistik. "BERITA RESMI STATISTIK. No. 68/11/74/Th. XIX, 5 November 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025." Sulawesi Tenggara, 2025.

Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks pembangunan manusia 2023. BPS.

Bahl, R. W., & Linn, J. F. (1992). Urban public finance in developing countries. Oxford University Press.

Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi ke-3). Erlangga.

Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.

Dwiyanto, Agus. Mewudujkan Good Governence. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

Hair, J. F., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Hult, G. T. M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (Edition 3). Sage Publishing.

Halim, A. (2019). Akuntansi keuangan daerah (Edisi ke-5). Salemba Empat.

Halim, A., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan keuangan daerah (Edisi ke-3). UPP STIM YKPN.

Handayani, A. A. (2020). Pengaruh flypaper effect terhadap kinerja keuangan daerah dengan pajak daerah sebagai variabel intervening pada kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014–2017 (Tesis magister tidak diterbitkan). Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.

harianpublik.id. "Pendapatan Daerah Konkep Capai 57 Persen Di Semester I." Harianpublik.Id, 2025. https://harianpublik.id/pendapatan-daerah-konkep-capai-57-persen-di-semester-i/#google_vignette.

Harsanto. "Belanja Pegawai APBD Konawe Kepulauan 2026 Capai 45 Persen, Di Atas Batas Ideal Pemerintah." Batam.Tribunnews.Com, 2026. https://batam.tribunnews.com/news/687354/belanja-pegawai-apbd-konawe-kepulauan-2026-capai-45-persen-di-atas-batas-ideal-pemerintah.

Haryono, Dandan, and St Ramlah. "Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antara Wilayah Barat Dan Timur Indonesia: Tantangan Dan Solusi Ekonomi." SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi 3, no. 3 (2024): 151–62.

Islam, Z. Z., Amang, B., & Tjan, J. S. (2025). Pengaruh kompetensi digital, budaya kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. SEIKO: Journal of Management & Business, 8(2), 132–141.

Kawatak, Salsabila Kamariah. "Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan." JIM: Journal Of International Management 2, no. 01 (2023): 85–103.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026). Portal data APBD: Postur APBD Kabupaten Konawe Kepulauan. SIKD Kemenkeu.

Kementerian PANRB Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

konkepkab.go.id. "Pemkab. Konkep. Kembali Raih Opini WTP Ke-7 Berturut-Turut," 2026. https://konkepkab.go.id/lihatberita-11245.

Kromen, M.L.B., Manafe, H.A. dan Perseveranda, M.E. (2023), "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah", Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol. 4, No. 4, hlm. 460–468.

Kuncoro, M. (2014). Otonomi daerah: Menuju era baru pembangunan daerah (Edisi ke-3). Erlangga.

Laga, Y. M. V. I., & Hidayat, M. T. (2021). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Flores Timur (NTT) (Tesis magister tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.

Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). Rethinking decentralization in developing countries. World Bank.

Mahmudi. (2010). Manajemen kinerja sektor publik (Edisi ke-2). UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi ke-3). UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah (Edisi ke-4). Andi.
Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). McGraw-Hill.
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi sektor publik (Edisi ke-2). Salemba Empat.
Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich.
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. (2023). Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. (2024). Geografis Kabupaten Konawe Kepulauan. konkepkab.go.id.
Purnomo, Budi S. (2009). Obligasi Daerah: Alternatif Investasi bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan bagi Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
Rampisela, A. S., Kadir, H., & Muin, A. (2021). Akuntabilitas dan efektivitas pembangunan daerah di kawasan Indonesia Timur. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 57.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130. [Telah dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah].
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123.
Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 12.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 152.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4.
Rerung, Denisha, Olivya Vivien, Lili Palamba, Riani Sandi Parangki, Petrus Peleng Roreng, Afian Dezi, and Sanda Sipi. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kemandirian Fiskal Dan

Strategi Dalam Peningkatan PAD." Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) 4, no. 4 (2025): 1689–95.

Sandy, S., Arfah, A., Semmaila, B., Amang, B., & Arifin. (2022). Penyebab rendahnya penggunaan transaksi non tunai di Kota Timika. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(12), 18801–18810.

Sahrudin, and Syahid. "Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Ditengah Kebijakan Efisiensi Anggaran." Sosio E-Kons 17, no. 3 (2025): 247–57.

Sedarmayanti. (2012). Good governance dan good corporate governance (Edisi ke-3). Mandar Maju.

Sharon, S. S., & Arif, M. (2024). Musyawarah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 15(1), 205–221. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2024.15.1.15

Sharon, S., Monalisa, M., Muchtar, M., Firman, A., Basir, M. K., & Arif, M.(2025). Revitalizing green economic capability to maintain the financial stability of MSMEs in Bira Beach. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 26(1), 1–10. https://doi.org/10.18196/jesp.v26i1.24080

Shmueli, G., Ray, S., Velasquez Estrada, J. M., & Chatla, S. B. (2016). The prediction power of PLS path models. Journal of Systems and Information Technology, 18(3), 260-282.

Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J. H., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM: Guidelines for using PLSpredict. European Journal of Marketing, 53(11), 2322-2347.

Siagian, S. P. (2008). Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya. Bumi Aksara.

Sianturi, F.A.E. dan Dwicaksono, A. (2023), "Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia", Bappenas Working Papers, Vol. 6, No. 1, hlm. 38–59.

Tjokroamidjojo, B. (1994). Perencanaan pembangunan (Edisi ke-3). Gunung Agung.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan ekonomi (Edisi ke-11, Jilid I, Terj. Agus Dharma). Erlangga.

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. UNDP.

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations.

Wahyuni, F. dan Ali, H. (2024), "Pengaruh Kemandirian Keuangan, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan terhadap Pembangunan Daerah", Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 5, No. 3, hlm. 583–593.

World Bank. (1992). Governance and development. World Bank.

Yuliani, N. L. (2014). Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah (Tesis magister tidak diterbitkan). Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yuwono, S., Utomo, D. S., Giri, I., & Kuncoro, B. A. (2008). Memahami APBD dan permasalahannya. Bayumedia Publishing.